



























KETUHANAN DALAM PERUMUSAN PANCASILA

Kokohnya Bangsa Indonesia karena adanya Nilai-Nilai Religius dalam masyarakatnya.

Agoes Salim (Tokoh SI) mengkritik gagasan nasionalisme gaya Eropa yang meminggirkan nilai-nilai ketuhanan dengan mengagungkan keduniaan.

Sementara Soekarno memandang nilai-nilai Ketuhanan merupakan pembeda antara Nasionalisme gaya Eropa dengan Nasionalisme Indonesia.

KETERKAITAN AGAMA DAN NEGARA

Kekuatan Politik Di Akhir Penjajahan Jepang :

- 1. Gol. Kebangsaan yang tergabung dalam Jawa Hokokai
 - · Berpandangan negara hendaknya netral terhadap agama.
 - Ada pemisahan negara dan agama.
- 2. Gol. Islam yang tergabung dalam Masyumi. Negara tidak bisa dipisahkan dari agama,

 - Ingin adanya penyatuan negara dan agama,

MOHAMMAD HATTA (Nasionalis Yang Agamis):

Dalam Islam tidak dikenal pemisahan atau pertentangan antara agama dan negara, karena Islam tidak mengenal kependetaan.

Namun urusan agama dipisah dengan urusan negara agar tidak saling campur aduk. Ia ingin menunjukkan bahwa perlu ada pembedaan (diferensiasi) antara fungsi agama dan fungsi negara.

PIDATO SOEKARNO 1 JUNI 1945

- → Dirinya tidak mendukung gagasan Islam sebagai dasar
- ∠ Mengusulkan prinsip Ketuhanan sebagai salah satu sila dari lima filosofi dasar negara yang disebut Pancasila.

Dalam SIDANG BPUPKI, Soekarno membentuk panitia kecil berjumlah 9 orang (5 Gol. Kebangsaan dan 4 Gol. Islam) untuk menyusun rancangan pembukaan Undang-undang Dasar.

Awalnya tidak ada ketidakcocokan, akhirnya terjadi titik temu ... Pada alinea ketiga disebutkan, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas..." Alinea ini mencerminkan pandangan kedua golongan tersebut.

Kisah Nyata: Ketika Sri Sultan HB IX terkena tilang di Pekalongan

Integritas tinggi (Konsisten – Keras Kepala) Sulitnya melakukan Proses Perubahan Mendapatkan Reward Cinta Tanah Air Tidak Profit Oriented Menyadari kesalahan yang dilakukan Sri Sultan HB IX Berjiwa Besar Memberikan Penghargaan Toleransi pada tempat yang salah
 Tegas hanya pada bawahan Komisaris

Menegakkan aturan sesuai SOP

Tidak Diskriminatif

Royadin



Hormat amat sangat kepadamu Pak Royadin, Sang Polisi sejati. Dan juga kepada pahlawan bangsa Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang keluasan hatinya melebihi wilayah negeri ini dari Sabang sampai Merauke.

Kisah Nvata:

Si Jalak Harupat (Burung Jalak yang Berani)

· Aktif dalam Organisasi Budi Utomo

Berani dan Tegas Sikap Peduli Mengungkap kasus penyiksaan Peiuang Keadilan

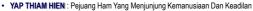
Bertahan hidup

Berbuat tidak adil

dan Dewan Kota







• Ibu Hj. ANDI RABIAH : Suster Apung

Serakah



Otto Iskandar

Petani/Rakyat

J.F. Jasper

Pengusaha

Dinata



Kisah Sri Sultan HB IX: MENUNJUKKAN RASA MEMILIKI DAN MENCINTAI TANAH AIR



Sri Sultan yang memenuhi janjinya ketika menyampaikan pidato penobatannya pada 18 Maret 1940.

Ketika itu beliau menyatakan: "izinkanlah saya mengakhiri pidato ini dengan berjanji, semoga saya dapat kerja untuk memenuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya. Seraya kemudian menegaskan dirinya, Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, tetapi pertama-tama saya adalah dan tetap orang Jawa.

Sri Sultan Hamengkubuwono pun dikenal sebagai pemimpin yang melindungi rakyatnya dan memosisikan dirinya sebagai pengabdi rakyat dan pembela republik.

Kisah John Lie: PATRIOTISME DAN NASIONALISME WARGA KETURUNAN



Laksamana Muda John Lie (Keturunan Tionghoa) ketika ditanya oleh KSAL Laksamana M Pardi mengenai keinginannya bergabung dengan TNI-AL, John Lie menjawab: "Saya datang bukan untuk cari pangkat, saya datang kesini mau berjuang di medan laut. Hal ini dibuktikan oleh pilihan John Lie bergabung dengan TNI AL, dan berjuang bersama rakyat Indonesia, ketimbang menikmati hidup enak sebagai pelaut dan nahkoda Kapal

John Lie sebelumnya juga pernah menjadi nahkoda Kapal Perang Sekutu (Royal Navy) dalam perang dunia kedua.

Kisah Muhammad Natsir : PANCARAN KEPEMIMPINAN YANG PENUH HIKMAT DAN KEBIJAKSANAAN



M. Natsir sebagai salah seorang ketua Partai Masyumi dikenal sebagai penggagas Mosi Integral, yaitu mosi penyatuan Negara Indonesia dari model RIS (Republik Indonesia Serikat) kembali menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik

Natsir melakukan strategi persuasive dan penjajagan dengan mengedepankan prinsip prinsip musyawarah mufakat dan hikmat kebijaksanaan.



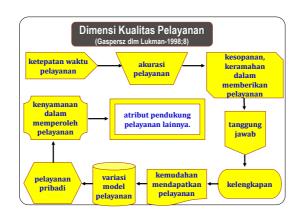
ASN SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK













MAKNA INTEGRITAS

- ∠ KBBI : adalah mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
- Etimologis (Integer / Incorruptibility): suatu sikap yang teguh mempertahankan prinsip yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.
- Stephen R. Covey (2006):
 - Kejujuran berarti menyampaikan kebenaran, ucapannya sesuai dengan kenyataan.
 - Integritas melakukan secara konsisten sesuai dengan apa yang kita katakan hendak kita lakukan.







LIMA ASPEK REFORMASI BIROKRASI YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK :

- 1. Menerapkan prinsip good governance, rekrutmen pegawai bebas KKN, menerapkan sistem merit (kompetensi)
- 2. Perbaikan kualitas pelayanan publik
- 3. Memiliki sense of crisis: tanggap darurat
- 4. Bersikap profesional dengan mengedepankan prinsip public-accountability dan responsibility
- 5. Lebih aspiratif dan akomodatif.

TIGA HAL PENTING DALAM PELAYANAN PUBLIK:



2

3

Merupakan suatu kewajiban. Objek layanan adalah publik.

Bentuk layanan : barang dan jasa.





UU No. 25 Tahun 2009

Penyelenggara Pelayanan Publik :

setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (pasal 1 ayat (2)).

Pelaksana Pelayanan Publik:

pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

TUJUAN PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK UU No. 25 Tahun 2009

- Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

STANDARD PELAYANAN MINIMUM (Pasal 21)

- a. kepastian hukum;
- b. kesamaan hak;
- c. keseimbangan hak dan kewajiban;
- d. keprofesionalan;
- e. partisipatif;
- f. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas:
- i. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- j. ketepatan waktu; dan
- k. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Paradigma Pelayanan Publik Berorientasi pada pengelola pelayanan Paradigma Pelayanan Publik Berorientasi pada kepuasan pengguna layanan (customer driven government)































KELOMPOK VI



